

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adidaya sekaligus merupakan “polisi dunia” yang bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, seperti yang tercantum dalam doktrin Tata Dunia Baru (*New World Order*).<sup>1</sup> Oleh karena itu, Amerika Serikat kerap melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di dunia agar tetap stabil. Namun, Amerika Serikat kerap menggunakan cara-cara *hard diplomacy* dalam upayanya mencegah adanya ancaman instabilitas keamanan dan perdamaian seperti dengan pengiriman senjata api, pengiriman pasukan militer, pemberian sanksi ataupun boikot.

Upaya Amerika Serikat yang kerap menggunakan cara konfrontatif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia dapat dilihat antara lain dalam keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Korea. Dalam Perang ini, Amerika Serikat memberikan bantuan berupa pengiriman pasukan ke Korea untuk melawan komunisme di Korea Utara.<sup>2</sup> Amerika Serikat juga terlibat dalam perang yang terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 1965 dimana kedua negara memperebutkan

---

<sup>1</sup>Jennifer Morrison Taw, Robert C. Leicht, *The New World Order And Army Doctrine*, RAND library collection, Santa Monica, 1992, Hal. 1

<sup>2</sup>California Content Standard, *The Truman Doctrine and the Marshall Plan*, dalam <http://www.primohistory.com/Standard%2010.9.3%20Shortcut.pdf> diakses pada 6 Februari 2015

status atas wilayah Jammu dan Kashmir. Perang ini diawali dari proses dekolonisasi di wilayah Asia Selatan ketika India merdeka dari koloni Inggris pada tahun 1947, wilayah koloni tersebut kemudian dibagi menjadi dua entitas yang terpisah: bangsa sekuler India dan negara mayoritas Muslim Pakistan.<sup>3</sup> Dalam konflik diantara 2 negara tersebut, Amerika Serikat bersama dengan Inggris pada awalnya memberikan bantuan suplai pasokan militer kepada tentara India yang pada waktu itu juga berperang melawan Cina dalam permasalahan perbatasan.<sup>4</sup>

Namun, pada perkembangannya India berpaling ke pihak Uni Soviet serta Amerika Serikat melihat Pakistan sebagai contoh negara muslim moderat dan menghargai bantuan Pakistan dalam melawan ekspansi komunis dengan bergabung dalam Treaty Organization Asia Tenggara (SEATO) pada tahun 1954 dan Pakta Baghdad (kemudian berganti nama menjadi CENTO, atau CENTO) pada tahun 1955 maka Amerika Serikat dan Inggris kemudian menyuplai senjata ke Pakistan.<sup>5</sup>

Amerika Serikat juga terlibat dalam kasus Kosovo dimana wilayah Kosovo merupakan daerah yang diperebutkan oleh Republik Serbia dan Kosovo (memproklamkan diri sendiri). Kosovo kemudian menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Februari 2008, sementara Serbia mengklaim sebagai bagian dari wilayah Kosovo merupakan teritorial Serbia. Kemerdekaannya diakui oleh 108 negara anggota PBB. Dalam kasus ini, Amerika Serikat melalui NATO mengusahakan

---

<sup>3</sup>Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, *The India-Pakistan War of 1965*, dalam <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/india-pakistan-war> Diakses pada 6 Februari 2015

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid

berbagai resolusi perdamaian namun pada tanggal 13 Oktober 1998, menyusul memburuknya situasi, Dewan NATO resmi mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan udara.<sup>6</sup> Langkah ini dirancang untuk mendukung upaya-upaya diplomatik untuk membuat Serbia menarik pasukan dari Kosovo, bekerja sama dalam membawa mengakhiri kekerasan dan memfasilitasi kembalinya pengungsi ke rumah mereka.<sup>7</sup>

Selain itu, Amerika Serikat juga aktif terlibat dalam konflik Crimea yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dalam konflik yang dilatar belakangi perebutan wilayah Crimea tersebut Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengatakan akan memberlakukan sanksi ekonomi kepada Rusia karena Rusia dianggap bertanggung jawab dalam konflik yang terjadi di wilayah Eropa Timur tersebut.<sup>8</sup> Hal tersebut ditambah dengan pernyataan dari beberapa pejabat pemerintah Amerika Serikat seperti Robert Mendez, seorang Demokrat yang menjalankan Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengatakan kepada CNN: "Kita harus menyediakan Ukraina dengan jenis senjata defensif."<sup>9</sup> Selain itu, Senator McCain menyerukan sanksi yang kuat kepada Rusia, sebelum menambahkan bahwa Ukraina harus disertakan dengan senjata "Berikan mereka senjata yang mereka butuhkan".<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>NATO Historical Overview, *NATO's role in relation to the conflict in Kosovo*, dalam <http://www.nato.int/kosovo/history.htm> diakses pada 8 Februari 2015

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Bradley Klapper, *Obama condemns Russia for Ukraine violence; rules out U.S. military involvement*, dalam <http://www.pbs.org/newshour/rundown/u-s-condemns-russias-invasion-ukraine/> diakses pada 8 Februari 2015

<sup>9</sup>BBC News, *Ukraine crisis: US senators urge arms 'to fight Russia*, dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-29007631> diakses pada 8 Februari 2015

<sup>10</sup>Ibid

Baru-baru ini juga, di kawasan Asia Pasifik terdapat beberapa permasalahan yang mulai timbul dan menyita perhatian dunia internasional. Salah satunya adalah adanya kasus sengketa perebutan wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang berada di wilayah Laut Cina Timur antara Jepang dengan Cina. Dalam permasalahan ini, Amerika Serikat melakukan beberapa upaya untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut. Hal yang kemudian menarik dari keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa ini adalah dikarenakan sengketa ini melibatkan 2 aktor negara besar yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Pasifik serta memiliki peran yang penting tidak hanya bagi Amerika Serikat namun juga bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan gugusan kepulauan tidak berpenghuni yang berada di perairan Laut Cina Timur yang terletak sekitar 120 mil dari Taiwan, 120 mil dari dataran Cina dan 200 mil dari Okinawa Jepang.<sup>11</sup> Kemudian dalam skripsi ini penulis akan menggunakan nama Kepulauan Senkaku dikarenakan nama tersebut lebih sering digunakan. Sengketa yang terjadi di wilayah Kepulauan Senkaku ini sebenarnya telah terjadi sejak lama, hal ini dikarenakan kerap bergantinya kepemilikan terhadap teritorial di wilayah kepulauan yang terletak di Laut Cina Timur tersebut. Secara historis, kepulauan ini pertama kali ditemukan oleh Cina pada masa pemerintahan Dinasti Ming (1368-1644) yang kemudian diberi nama Diaoyu Dao. Namun sehubungan dengan kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada

---

<sup>11</sup>Hesti Karismaya “Manajemen Konflik Jepang-Cina Dalam Mengatasi Sengketa Kepulauan Senkaku”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 543-554, hal. 547

tahun 1895, Cina harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Jepang seperti yang tercantum dalam perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani pada 17 April 1895. Pada artikel kedua perjanjian tersebut menyatakan bahwa wilayah Cina yang harus diberikan kepada Jepang atas kekalahannya dalam peperangan adalah Taiwan beserta dengan kepulauan-kepulauan yang masuk dalam wilayah teritorinya, termasuk Kepulauan Senkaku.<sup>12</sup>

Semenjak itu, Taiwan serta kepulauan-kepulauan disekitarnya termasuk Kepulauan Senkaku jatuh kedalam administrasi pemerintahan Jepang. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memaksa Jepang harus melepaskan semua wilayah yang telah diduduki Jepang sejak Perang Dunia I termasuk Taiwan serta Mantsyuria seperti yang tercantum pada Perjanjian San Fransisco antara Jepang dengan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 8 September 1951.<sup>13</sup>

Berdasarkan Perjanjian San Fransisco inilah, Cina beranggapan bahwa Kepulauan Senkaku kembali masuk ke dalam wilayah teritorialnya. Disisi lain Jepang merasa bahwa Kepulauan Senkaku masih berada dibawah administrasi pemerintahannya, hal tersebut berdasar pada artikel kedua disebutkan bahwa Jepang akan mengembalikan wilayah Taiwan kepada Cina namun Kepulauan Senkaku tidak tercantum di dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini Jepang merasa tidak perlu mengembalikan Kepulauan Senkaku kepada Cina. Inilah yang menjadi awal

---

<sup>12</sup>Anugerah Hendri Rahmanto, "Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, hal. 70

<sup>13</sup>Ibid

munculnya sengketa Kepulauan Senkaku diantara Cina dengan Jepang. Keadaan menjadi semakin memanas setelah pada tahun 1968 UN Economic-Commission For Asia and Far-East (ECAFE) menerbitkan hasil survey terhadap wilayah disekitar Kepulauan Senkaku dan mengatakan bahwa wilayah tersebut mengandung sumber daya minyak yang melimpah.<sup>14</sup>

Untuk meredakan ketegangan yang terjadi diantara dua negara yang memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Pasifik tersebut, kedua negara akhirnya setuju untuk membuat perjanjian yang disebut dengan *Japan-Cina Peace and Friendship Treaty*. Dalam isinya, *Japan-Cina Peace and Friendship Treaty* menegaskan bahwa kedua negara harus mengembangkan hubungan perdamaian dan persahabatan atas dasar prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan integritas wilayah, tidak saling melakukan agresi dan non-interferensi dalam urusan internal masing-masing, selain itu juga menegaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua negara harus menahan diri dan menyelesaikan dengan cara damai.<sup>15</sup> Amerika Serikat dibawah pimpinan Presiden Jimmy Carter memiliki peran yang penting dalam pembacaan akhir perjanjian tersebut.

Setelah ditanda tangannya *Japan-Cina Peace and Friendship Treaty*, ketegangan antara kedua negara akibat sengketa wilayah Kepulauan Senkaku mereda.

---

<sup>14</sup>Yuki Tatsumi, *Senkaku Island/East Cina Sea Disputes- A Japanese Perspective*, dalam [http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Yuki-CNA\\_paper\\_8-2013.pdf](http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Yuki-CNA_paper_8-2013.pdf), diakses pada 8 Februari 2015

<sup>15</sup>Cross-Strait Security Initiative, *Treaty of Peace and Friendship Between Japan and The People's Republic of Cina*, dalam [http://csis.org/images/stories/taiwan/japan\\_1978\\_treatypeacefriendship.pdf](http://csis.org/images/stories/taiwan/japan_1978_treatypeacefriendship.pdf) diakses pada 8 Februari 2015

Perjanjian ini terbukti dapat menjaga perdamaian dalam kasus sengketa perebutan Kepulauan Senkaku selama bertahun-tahun. Namun beberapa tahun belakangan ini, sengketa Kepulauan Senkaku kembali memanas. Meningkatnya ketegangan sengketa Kepulauan Senkaku dipicu oleh beberapa hal seperti aktivis nasionalis Cina yang melakukan demonstrasi anti Jepang dan merusak beberapa fasilitas bisnis milik warga Jepang di Cina.<sup>16</sup> Kemudian ditambah pada tahun 2005, Pemerintah Jepang memberikan ijin eksplorasi gas alam kepada Japan Petroleum Exploration Codan Teikoku Oil Codisekitar Laut Cina Timur yang kemudian dianggap oleh Pemerintah Cina sebagai langkah provokasi serta klaim sepihak atas kepulauan tersebut.<sup>17</sup>

Menanggapi kembali memanas nya sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina, secara tegas mengatakan akan menjadi pihak yang netral. Namun, sehubungan dengan fokus politik luar negeri Presiden Obama, *pivot to Asia*, baru-baru ini pada kunjungan Presiden Obama ke Jepang pada April secara tegas menegaskan bahwa Pulau Senkaku di Laut Cina Timur sejalan dengan perjanjian keamanan Jepang dengan Amerika Serikat.<sup>18</sup> Meskipun menegaskan posisi Amerika Serikat dalam sengketa ini, namun Obama menegaskan bahwa jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kasus sengketa ini adalah melalui jalan damai dan

---

<sup>16</sup>Hesti Karismaya “Manajemen Konflik Jepang-Cina Dalam Mengatasi Sengketa Kepulauan Senkaku”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 543-554, hal. 544

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Mizuho Aoki, *Obama assures Abe on Senkakus*, dalam <http://www.japantimes.co.jp/news/2014/04/24/national/obama-tells-abe-security-treaty-covers-senkaku/#.VDqpXhYncok> diakses pada 9th September 2014

dialog.<sup>19</sup> Hillary Clinton melalui pidatonya di konferensi KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam pada bulan November 2010 Clinton mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendorong Jepang dan Cina untuk mencari resolusi damai dalam sengketa Kepulauan Senkaku serta bersedia menjadi mediator dalam perselisihan, yang mulai memanas pada tahun 2010 tersebut.<sup>20</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada periode kedua pemerintahan Obama, John Kerry. Kerry mengatakan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida di Iikura Guest House di Tokyo, Jepang pada tanggal 14 April 2013 bahwa Amerika Serikat tidak mengambil posisi dalam sengketa Kepulauan Senkaku namun, sehubungan dengan Perjanjian San Francisco, Kepulauan Senkaku berada di bawah perlindungan militer Amerika Serikat. Kerry menambahkan bahwa Amerika Serikat menginginkan penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku melalui cara-cara damai.

Dapat dilihat bahwa dalam kasus sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina, Amerika Serikat memilih cara-cara *soft diplomacy* dengan ikut andil dalam perjanjian *Japan-Cina Peace and Friendship*. Selain itu pada masa kepemimpinan Presiden Obama, Amerika Serikat juga menegaskan bahwa penggunaan jalan damai dan negosiasi merupakan jalan keluar terbaik. Hal tersebut

---

<sup>19</sup>Reuters, *Obama Says US-Japan Security Treaty Covers Disputed Senkaku/Diaoyu Islands*, dalam <http://www.ibtimes.com/obama-says-us-japan-security-treaty-covers-disputed-senkakudiaoyu-islands-1575040> diakses pada 19 September 2014

<sup>20</sup>CNN's Elise Labott, *Clinton urges Japan and China to return to talks over disputed islands*, dalam <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/30/vietnam.clinon.visit/> diakses pada 17 Maret 2015



merupakan bagian dari *preventivediplomacy* sebagai upaya Amerika Serikat meredam adanya konflik terbuka di wilayah tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut “Mengapa Amerika Serikat melakukan upaya untuk meredam adanya konflik terbuka dalam kasus sengketa Kepulauan Senkaku yang terjadi antara Cina dengan Jepang?”

## C. Landasan Teori

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan **Teori Sistem** dalam buku *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey* karya James E. Dougherty. Dalam buku tersebut, James E. Dougherty menjelaskan definisi dari teori sistem dengan menggabungkan dua pendekatan fundamental dari teori hubungan internasional.

Yang pertama fokus kepada aktor dan tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut, baik aktor tersebut merupakan individu, kelompok masyarakat seperti contohnya bangsa, atau unit birokrasi.<sup>21</sup> Pendekatan kedua menekankan pada struktur

---

<sup>21</sup>James E. Dougherty, *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey*, Longman, New York City, 1997, hal. 100

yang menyediakan kerangka kerja dimana interaksi antar aktor tersebut dapat terjadi, struktur memiliki efek yang mendasar terhadap interaksi antar aktor tersebut.<sup>22</sup>

Robert J.Lieber mengatakan bahwa sistem teori merupakan statemen dari hubungan antara variabel yang independen dan dependen yang mana perubahan dari satu variabel atau lebih dapat mengakibatkan perubahan atau pergantian pola hubungan variabel lainnya.<sup>23</sup> Maka dapat dikatakan bahwa Teori Sistem merupakan hubungan antara aktor dalam sebuah kerangka kerja yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah negara yang saling terkait, sistem tersebut dapat terorganisasi secara kuat ataupun lemah, stabil atau tidak stabil. Sebuah sistem yang stabil membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat mengganggu stabilitas sistem tersebut, sedangkan sistem yang tidak stabil dapat dengan mudah terganggu stabilitasnya.<sup>24</sup>

Hal lain yang berhubungan dengan sistem teori adalah istilah interdependensi, yang dapat dikatakan sebagai hasil dari interaksi antar komponen (dalam hal ini bisa berarti negara atau non negara) yang saling berinteraksi.<sup>25</sup> Semakin besar tingkat interdependensi, maka semakin besar juga interaksiserta tingkat kompleksitas yang meningkat. Interaksi tersebut tidak hanya terdiri dari tuntutan dan tanggapan dari negara, organisasi internasional serta non negara, tapi juga termasuk di dalamnya transaksi yang melewati batas negara, termasuk dialaminya perdagangan, pariwisata,

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid hal.102

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

investasi, dan lain-lain.<sup>26</sup> Menurut Edward L Morse, interdependensi merupakan hasil dari tindakan tertentu yang dilakukan oleh 2 atau lebih pihak dimana hasil dari tindakan tersebut memiliki sifat yang saling bergantung. Menurut Morse, interdependensi yang semakin kuat akan menghasilkan ancaman krisis yang lebih besar, “Interdependensi tidak hanya menghasilkan krisis, namun juga meningkatkan kemungkinan potensi dari pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi krisis tersebut untuk kepentingan politik dalam maupun luar negeri”.<sup>27</sup> Sedangkan Richard Rosecrance dan Arthur Stein melihat interdependensi sebagai hubungan kepentingan antar negara sehingga jika posisi sebuah negara berubah, negara lainnya juga akan mengalami efek dari perubahan tersebut.<sup>28</sup>

Apabila teori ini diaplikasikan ke dalam kasus ini, maka dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat merupakan pihak yang independen dimana Amerika Serikat tidak terlibat secara langsung dalam kasus sengketa tersebut dan merupakan aktor yang mempengaruhi pihak yang bersengketa, sedangkan Jepang dan Cina merupakan aktor dependen karena keduanya merupakan aktor yang terlibat secara langsung dengan konflik sengketa Kepulauan Senkaku. Sistem yang menjadi wadah atau tempat berlangsungnya sengketa kepulauan tersebut adalah kawasan Asia Pasifik.

Melihat sengketa perebutan Pulau Senkaku yang terjadi antara Jepang dengan Cina, Amerika Serikat melakukan berbagai upaya agar sengketa ini tidak berubah

---

<sup>26</sup>Ibid hal 103

<sup>27</sup>Ibid Hal104

<sup>28</sup>Ibid

menjadi konflik terbuka dengan menjadi fasilitator dalam pembacaan akhir *Japan-Cina Peace and Friendship Treaty* serta mendesak Perdana Menteri Jepang Fukuda Takeo untuk segera menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut pada pertemuan keduanya bulan Mei 1978. Bentuk lainnya dari upaya Amerika Serikat adalah dengan statement adalah baru-baru ini Amerika Serikat bersedia untuk menjadi mediator apabila diminta oleh kedua negara.

Jika dikaitkan dengan teori sistem yang telah dijabarkan diatas, makakebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung penyelesaian kasus sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina menggunakan jalan damai adalah dikarenakan Amerika Serikat menilai bahwa Asia Pasifik yang dalam kasus ini merupakan sistem atau wadah merupakan kawasan yang kompleks tidak hanya rawan terjadi konflik antar negara, namun negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga memiliki tingkat interdependensi yang tinggi dan kompleks antar masing-masing .

Amerika Serikat kemudian menilai bahwa apabila sengketa Kepulauan Senkaku yang terjadi antara Jepang dengan Cina berubah menjadi konflik terbuka dengan penggunaan militer, maka dapat mengganggu interdependensi yang terjalin kuat di wilayah Asia Pasifik. Interdependensi yang terganggu tersebut kemudian tidak hanya menghasilkan krisis, namun juga mengancam stabilitas di wilayah Asia Pasifik baik stabilitas ekonomi, politik maupun keamanan. Tentu saja apabila stabilitas di wilayah Asia Pasifik mengalami gangguan maka dapat memberikan dampak bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki

kepentingan untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik khususnya dalam bidang perekonomian mengingat Cina dan Jepang merupakan negara perekonomian yang penting di kawasan Asia Pasifik. Bidang perekonomian yang dapat terkena dampak adalah bidang perdagangan dan investasi.

#### D. Hipotesa

Dari kerangka teori diatas maka dapat diambil hipotesa bahwa :

Amerika Serikat melakukan upaya agar sengketa di Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina tidak berubah menjadi konflik terbuka adalah karena Amerika Serikat memiliki kepentingan yaitu adanya interdependensi Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik khususnya dalam bidang perekonomian seperti kepentingan dalam bidang perdagangan dan investasi.

#### E. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas, maka penulis memberikan jangkauan pembahasan Amerika Serikat di dalam kasus sengketa kepulauan Senkaku. Penulis membatasi pembahasan yaitu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencegah adanya konflik terbuka antara Jepang dengan Cina pada masa kepemimpinan Presiden Jimmy Carter hingga sekarang masa kepemimpinan Barrack Obama.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersumber dari library research atau studi kepustakaan dengan mengambil sumber dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media rilis, artikel ilmiah, dan lain sebagainya.

## G. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dinamika perubahan politik luar negeri Amerika Serikat dan perannya di kawasan Asia Pasifik
2. Mengetahui informasi mengenai sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina.
3. Menganalisa alasan yang melandasi upaya Amerika Serikat untuk mencegah adanya konflik terbuka antara Jepang dengan Cina pada sengketa Kepulauan Senkaku.

## H. Sistematika Penulisan

1. Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian.

2. Bab II membahas dinamika politik luar negeri Amerika Serikat sehingga dapat dilihat bagaimana upaya Amerika Serikat menjaga stabilitas dan perdamaian dunia pada tiap kepemimpinan Presiden di Amerika Serikat.
3. Bab III membahas mengenai latar belakang penyebab serta perkembangan sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan Cina serta upaya Amerika Serikat untuk mencegah adanya konflik terbuka dalam kasus Sengketa Senkaku antara Jepang dengan Cina
4. Bab IV membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik khususnya dalam bidang perekonomian
5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bahasan dalam bab sebelumnya.

